

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH INDUSTRI MARMER
GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**RIZKIAWAN DIAN BESTARI
0910210084**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH INDUSTRI MARMER GUNA MENINGKATKAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

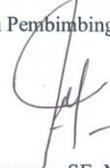
Yang disusun oleh :

Nama : Rizkiawan Dian Bestari
NIM : 0910210084
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Januari 2014

Malang, 24 Januari 2014

Dosen Pembimbing,



Eddy Suprpto, SE.,ME.

NIP. 19580709 198603 1 002

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH INDUSTRI MARMER GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Rizkiawan Dian Bestari, Eddy Suprpto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email : awan_rizki@yahoo.com

ABSTRAK

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki potensi besar untuk ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuannya bertahan dalam menghadapi badai krisis keuangan dan ekonomi yang menimpa Indonesia sejak medio tahun 1997. Di Kabupaten Tulungagung terdapat banyak UKM yang bergerak di sektor marmer. Industri marmer merupakan primadona di Kabupaten Tulungagung karena banyak memberikan manfaat guna menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung.

Dalam upaya memberdayakan industri kecil dan kerajinan, termasuk juga industri menengah Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyusun kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan pemberdayaan tersebut. Akan tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini lebih bersifat umum (untuk seluruh jenis industri), hal ini mengakibatkan kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan jenis industri yang ada di Kabupaten Tulungagung karena setiap industri itu memiliki karakter dan permasalahan yang berbeda-beda, sehingga hal itu membutuhkan penanganan yang berbeda-beda pula. Adapun bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diberikan kepada para pengrajin marmer yang meliputi: pembinaan Sumber Daya Manusia, pemasaran dan promosi produk, pembinaan dalam manajerial, memberikan bantuan alat.

UKM marmer memiliki banyak permasalahan dalam proses produksinya yang diantaranya yaitu modal, SDM dan kurangnya minat pemerintah daerah terhadap produk marmer. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan UKM marmer tersebut.

Kata Kunci: UKM, Marmer, Peran Pemerintah,

A. LATAR BELAKANG

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki potensi besar untuk ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuannya bertahan dalam menghadapi badai krisis keuangan dan ekonomi yang menimpa Indonesia sejak medio tahun 1997. Hal ini juga membuktikan bahwa UKM merupakan salah satu pelaku ekonomi yang kuat dan ulet. Diperkirakan di masa depan UKM akan cukup berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan ekonomi yang cepat berubah dan dapat meningkatkan posisi daya saing bukan hanya dalam pasar lokal tetapi juga dalam mendorong aktivitas ekspor yang pada akhirnya akan lebih mendorong pengembangan perekonomian daerah.

Kabupaten Tulungagung memiliki potensi industri yang besar, terutama untuk skala industri kecil dan menengah. Banyak usaha berbasis industri logam, tekstil, agro, kimia dan dan hasil hutan dikembangkan secara tradisional maupun modern oleh masyarakat luas di Kabupaten Tulungagung. Industri ini berkembang cukup signifikan dari tahun ke tahun melalui pembinaan oleh dinas teknis yang terkait. Pembinaan tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM pengusaha dan pelaku industri, pelatihan teknis ketrampilan dan manajemen usaha, bantuan sarana prasarana dan peralatan produksi, desain produk dan kemasan, serta pemasaran, kemitraan dan promosi.

Sentra-sentra industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung terintegrasi secara fungsi dengan wilayah pemukiman masyarakat. Sentra tersebut tidak berkembang dalam sebuah kawasan industri, namun berkembang dalam lingkup kawasan pemukiman dengan output barang industri.

Sentra industri ini mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam suatu kawasan pengembangan industri tertentu. Keberadaan sentra produk industri ini juga memudahkan Pemerintah Daerah melalui dinas yang terkait melakukan pembinaan secara berkesinambungan, termasuk didalamnya adalah mengukur seberapa jauh kontribusinya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Di Kabupaten Tulungagung terdapat banyak UKM yang bergerak di sektor marmer. Industri marmer merupakan primadona di Kabupaten Tulungagung karena banyak memberikan manfaat guna menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung sendiri. Namun pada perkembangannya, tidak sedikit industry marmer di Kecamatan Campurdarat yang bangkrut karena terganjal berbagai permasalahan. Hal inilah yang menuntut Pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung untuk berperan aktif dalam memberdayakan industri marmer, mengingat kontribusi yang diberikan oleh sektor ini tidaklah sedikit.

B. TINJAUAN PUSTAKA

UKM

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Kecil dan Menengah.

Beberapa lembaga, instansi, dan Undang-Undang seperti misalnya Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008 memberikan definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berbeda-beda. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai/memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

Karakteristik

Dilihat dari segi ekonomi, keberadaan UKM mempunyai posisi tawar yang lemah pada pasar. Hal ini disebabkan karena sifat usahanya yang kurang terorganisir, para pengusaha kurang menyadari pentingnya organisasi ekonomi seperti koperasi atau asosiasi yang lain sebagai kekuatan untuk menggalang kekuatan bersama. Mereka lebih suka bekerja sendiri-sendiri, bahkan terkadang mengarah pada kompetisi yang merugikan dan saling mematikan.

Peranan

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil diuraikan bahwa usaha kecil mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan melalui usaha kecil dapat memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat, mewujudkan pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas nasional, khususnya di bidang ekonomi.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern.

Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan UKM meliputi:

1. Potensi penciptaan lapangan kerja
2. Fleksibilitas yang ditopang oleh kemudahan relative dalam memperoleh bahan baku dan peralatan
3. Dalam jangka panjang berpeluang untuk menciptakan kemandirian pembangunan ekonomi
4. Relevansinya dengan proses desentralisasi kegiatan ekonomi

Kelemahan UKM dapat dilihat dari faktor intern dan ekstern, diantaranya adalah:

Faktor intern:

1. Lemahnya kemampuan akses pasar
2. Sumber modal yang terbatas
3. Perencanaan dan pengendalian kurang terperinci dengan baik
4. Pembagian kerja yang tidak proporsional dan karyawan sering bekerja diluar batas jam kerja standart
5. Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah dirumuskan, mist- manajemen dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip manajerial.

Faktor ekstern:

1. Informasi bisnis kurang didapat, hanya mengacu pada intuisi dan keinginan pengelolaan sehingga kurang dapat berkembang, terbatasnya jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pembina, terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan dan terbatasnya anggaran
2. Promosi yang belum optimal
3. Studi kelayakan tidak dilakukan, penelitian pasar dan analisis perputaran uang tunai tidak maksimal

Permasalahan yang dihadapi

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UKM meliputi faktor internal dan eksternal, Faktor internal:

1. Kurangnya modal, modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan unit usaha. Kurangnya permodalan UKM karena pada umumnya UKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari pemilik usaha yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga perbankan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administrative dan teknis yang diminta oleh bank umumnya tidak dapat dipenuhi.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk

berkembang secara optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM unit usaha tersebut relative sulit untuk mengadopsi perkembangan inovasi teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau pasar nasional dan bahkan internasional dan promosi yang terencana dengan baik.

Faktor eksternal:

1. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM meskipun dari tahun ketahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antar pengusaha – pengusaha kecil dengan pengusaha – pengusaha besar
2. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan IPTEK menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan
3. Sifat produk dengan lifetime pendek. Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk – produk fashion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek
4. Terbatasnya akses pasar, akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional

Tujuan dan Potensi

Tujuan UKM adalah sebagai media pendidikan sangat relevan dalam memperkuat dasar-dasar bagi kesuksesan usaha, baik menyangkut penguatan kapasitas manajemen (perencanaan, pengelolaan, pemasaran), ketrampilan layanan usaha, akses keuangan, dan sebagainya yang berbasis ekonomi kerakyatan yang maju, kompetitif, mandiri dan berperan secara berarti sebagai salah satu komponen strategis dari kemampuan industry secara keseluruhan.

Secara teoritis potensi UKM mempunyai korelasi yang signifikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan besarnya alokasi pembinaan UKM pada suatu daerah. Asumsinya semakin besar potensi UKM maka semakin besar pula kontribusi bagi peningkatan pembangunan ekonomi daerah khususnya ekonomi di pedesaan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian deskriptif. Fenomenologi merupakan suatu pengalaman subyektif dan studi tentang kesadaran dari perspektif seseorang (Moleong, 2009 :11).

Tabel 1: **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian	Kualitatif
Ruang Lingkup Penelitian	Disperindag Kabupaten Tulungagung
Jenis Data	Primer dan Sekunder
Teknik Pengumpulan Data	Wawancara, Kuesioner dan Observasi
Teknik Analisis data	Reading, Coding, Reducing, Displaying dan Intrepeting

Sumber: Ilustrasi Peneliti 2014

D. PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Memberdayakan UKM Marmer

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil dan Menengah (IKM), bahwa Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan penyangga perekonomian rakyat yang perlu memperoleh pembinaan dan perlindungan secara intensif.

Tujuan pembinaan dan perlindungan IKM adalah untuk:

1. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumberdaya alam, dan/atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan industri kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan ekonominya;
3. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha daerah, dengan mengembangkan pusat-pusat industri;
4. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian IKM di suatu wilayah tertentu agar semakin berkembang serta menjaga kegiatan ekonomi yang memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
5. meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;

Dalam upaya memberdayakan industri kecil dan kerajinan, termasuk juga industri menengah Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyusun kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan pemberdayaan tersebut. Akan tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini lebih bersifat umum (untuk seluruh jenis industri), hal ini mengakibatkan kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan jenis industri yang ada di Kabupaten Tulungagung karena setiap industri itu memiliki karakter dan permasalahan yang berbeda-beda, sehingga hal itu membutuhkan penanganan yang berbeda-beda pula.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap usaha industri dalam rangka mendukung kemampuannya untuk:

1. meningkatkan permodalan (*bankable*);
2. meningkatkan SDM;
3. meningkatkan kemampuan pemasaran; dan
4. meningkatkan penguasaan teknologi produksi.

Pemerintah Daerah memfasilitasi IKM untuk mengakses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau bukan bank. Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM, Pemerintah Daerah melakukan pendidikan dan pelatihan manajemen, peningkatan kualitas dan teknik produksi desain yang diperlukan oleh IKM. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemasaran hasil industri, Pemerintah Daerah memfasilitasi hasil industri pada forum pameran baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional,

Karena kebijakan yang ada tersebut tidak semuanya sesuai dengan karakter dan kondisi permasalahan dari industri marmer yang ada di Kabupaten Tulungagung maka, upaya dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung untuk memberdayakan industri marmer haruslah disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung telah memberikan bantuan kepada para pengrajin marmer meliputi:

1. Pembinaan Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan dan peningkatan kemampuan, keahlian dan keterampilan para pengrajin marmer;

2. Pemasaran dan promosi produk dengan mengadakan pameran-pameran yang berskala nasional ataupun internasional;
3. Pelatihan dalam hal manajemen usaha yang baik;
4. Bantuan dalam memberikan alat seperti gergaji batu dan lain-lain.

Namun, bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dirasa kurang oleh para pengrajin marmer. Itu disebabkan karena permasalahan yang paling utama dari para pengrajin marmer adalah masalah modal/dana. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung tidak memberikan bantuan berupa modal/dana tunai, dan hanya memberikan bantuan berupa pembinaan administrasi dan manajerial.

Permasalahan lain seperti masalah Sumber Daya Manusia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung memberi bantuan berupa pelatihan dan peningkatan kemampuan pengrajin marmer dalam hal kreatifitas. Dari data yang diperoleh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung mengadakan program pelatihan dan peningkatan kemampuan pengrajin marmer dan onix setiap tahunnya. Program tersebut ditujukan agar para pengrajin marmer lebih kreatif dalam menentukan *design* dari setiap kerajinan marmer yang dibuat.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya minat pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung terhadap kerajinan marmer itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh bapak Andi Sulitiana, pemilik perusahaan marmer “Mustika Onix” dalam selebaran kuisisioner dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam selebaran tersebut beliau menyebutkan bahwa untuk pembangunan di Kabupaten Tulungagung, khususnya bangunan milik pemerintah Kabupaten Tulungagung diharapkan memakai batu alam/marmer dari Kabupaten Tulungagung, bukan dari Kabupaten lain. Beberapa tempat di kantor Pemerintah Tulungagung justru tidak ada yang memakai marmer dari Kabupaten Tulungagung. Seperti pembangunan alun-alun, Rumah sakit umum, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk masalah perdagangan, sampai saat ini perkembangan perdagangan kerajinan marmer sangat bagus, terutama di sektor ekspor. Menurut data yang didapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, badan usaha yang telah memiliki ijin ekspor adalah sebanyak tujuh unit, dengan perincian satu unit komoditas kertas dengan negara tujuan Malaysia, Mauritius, Singapura, New Zealand, Ethiopia dan Nikaragua, sedangkan 6 industri lainnya bergerak pada komoditi marmer serta berbagai produk kerajinan marmer dengan negara tujuan Taiwan, Singapura, Dubai, Kuwait, Perancis, Jerman, Belanda, Malaysia, Madagaskar, Swedia, Serbia, Italia, Spanyol, dan Vietnam.

Demikian halnya dengan perdagangan dalam negeri yang terus berkembang pesat seiring dengan pesatnya arus informasi dan media perdagangan. Perdagangan tidak hanya dilakukan melalui cara-cara yang konvensional, namun peranan perangkat teknologi informasi semakin dominan dan menjadi media utama pendukung perdagangan. Perdagangan tidak mengharuskan pelaku transaksi untuk berinteraksi langsung secara fisik, akan tetapi teknologi sudah memfasilitasi fungsi tersebut sehingga transaksi itu berjalan sempurna, termasuk didalamnya tata cara pembayaran dan pengiriman barang. Gambaran perdagangan seperti ini juga telah banyak digunakan oleh pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Tulungagung.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan industri marmer adalah dengan memberi bantuan dalam hal:

- a. Pembinaan Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan dan peningkatan kemampuan, keahlian dan keterampilan para pengrajin marmer;
 - b. Pemasaran dan promosi produk dengan mengadakan pameran-pameran yang berskala nasional ataupun internasional;
 - c. Pelatihan dalam hal manajemen usaha yang baik;
 - d. Memberikan alat seperti gergaji batu dan lain-lain.
2. Hal yang tetap menjadi kendala bagi perkembangan industri marmer hingga saat ini berasal dari segi permodalan dan kurangnya minat pemerintah lokal terhadap kerajinan marmer. Dari segi permodalan, pemerintah daerah tidak memberikan bantuan. Pemerintah daerah hanya memberikan bantuan berupa pelatihan administrasi dan manajerial agar dapat mengelola dana dengan baik. Untuk permasalahan kurangnya minat pemerintah lokal disebabkan karena bahan baku marmer yang ada di Kabupaten Tulungagung tidak semuanya cocok untuk kerajinan marmer. Dampak yang terjadi dari kejadian tersebut berpengaruh pada tingkat pendapatan dan pemasaran hasil usaha. Pada tingkat pendapatan dari pengrajin marmer terlihat bahwa setelah krisis jumlah pendapatan menurun, tidak seperti sebelumnya terjadi krisis. Akan tetapi yang tetap bertahan dan dalam kondisi stabil juga tetap ada. Selain itu permintaan pesanan konsumen untuk industri marmer menjadi sepi akibat adanya krisis ekonomi. Selanjutnya dilihat dari pemasaran hasil usaha juga dirasa kurang karena sebagian besar pemilik usaha marmer memiliki pendidikan rendah maka kurang mampu untuk mengakses informasi dari luar negeri.
 3. Perkembangan ekspor dari industri marmer cukup bagus. Dari data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, terdapat enam badan usaha yang bergerak di sektor marmer yang mengeksport kerajinan marmer ke beberapa Negara seperti Taiwan, Singapura, Dubai, Kuwait, Perancis, Jerman, Belanda, Malaysia, Madagaskar, Swedia, Serbia, Italia, Spanyol, dan Vietnam.

Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dalam rangka menunjang pemberdayaan UKM marmer di Kabupaten Tulungagung hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung menyusun suatu kebijakan khusus sektor industry marmer, sehingga proses pemberdayaan UKM marmer dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung seharusnya memberi bantuan berupa pinjaman modal dan juga ikut menentukan siapa saja yang berhak atau tidak berhak menerima bantuan tersebut.
3. Pembangunan di Kabupaten Tulungagung khususnya bangunan pemerintah daerah sebaiknya memakai kerajinan marmer dari Kabupaten Tulungagung, bukannya dari Kabupaten lain.
4. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan proteksi untuk lebih memperketat dan mengawasi masuknya para pesaing pendatang baru yang berasal dari Negara lain agar para pengrajin marmer tidak mengalami kerugian dan tetap berjaya di Kabupaten Tulungagung sehingga kebanggaan akan tetap dimiliki karena potensi terbesar untuk menunjang perekonomian daerah, industry marmer sangat berperan. Hal ini sangat berpengaruh bagi peningkatan pendapatan penduduk, khususnya pengrajin marmer.
5. Pengenalan produk teknologi baru yang berasal dari luar negeri sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi marmer itu sendiri.
6. Memperluas akses pasar untuk lebih mengenalkan produk dari industry marmer sehingga segala kendala yang dihadapi oleh pengrajin ataupun pemerintah mampu teratasi dengan baik.
7. Lebih diperbanyak lagi sosialisasi dan pameran-pameran nasional dan internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Farma, Salima. 2011. Metode dan Teknik Pengumpulan Data. <http://salimafarma.blogspot.com>. Diakses tanggal 16 Mei 2013.
- Gloria, Sandy. 2011. Pembangunan Ekonomi Daerah. <http://candygloria.wordpress.com>. Diakses tanggal 19 Maret 2012.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. 2011. *Pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil dan Menengah*.
- Phinastika, Dayinta. 2011. Pembangunan Ekonomi Daerah. <http://dayintapinasthika.wordpress.com>. Diakses tanggal 19 Maret 2012.
- Supardi, M.d. 2006. *Metodologi Penelitian*. Mataram : Yayasan Cerdas Press.
- Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Syafitri, Anis. 2012. Peran UKM Terhadap Perekonomian Nasional. <http://anissyafitri.blogspot.com>. Diakses tanggal 16 Mei 2013.